



**PENGARUH TINGKAT INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, NILAI TUKAR
RUPIAH, DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
TEGAL**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1) Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

SAEFI NURFAJRIANI

NPM : 4315500149

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2019

PERNYATAAN KEASLIAN ORISINALITAS

Saya Saefi Nurfajriani, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawabannya sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, Januari 2020

Yang Menyatakan,



Saefi Nurfajriani

PENGARUH TINGKAT INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, NILAI TUKAR
RUPIAH, DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
TEGAL

SKRIPSI

Oleh :

Saeji Nurfajriani

NPM : 4315500149

Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I

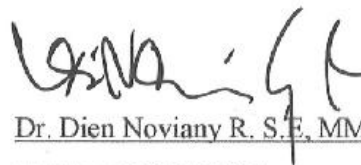


Sumarno, S.E, M.Si

NIPY. 8850811965

Tanggal

Pembimbing II



Dr. Dien Noviany R. S.E, MM, Akt.C.A

NIPY. 136628111975

Tanggal

Mengetahui,

Dekan



Dr. Dien Noviany R. S.E, MM, Akt.C.A

NIPY. 136628111975

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsiberjudul :**Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.** Yang diajukan oleh Saefi Nurfajriani, NPM : 4315500149 telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 11 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji



Sumarno, S.E, M.Si
NIPY.8850811965

Anggota I



Budi Susetyo, S.E, M.Si
NIPY.12452311971

Anggota II




Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Akt., CA
NIPY.1576981964

Mengetahui,

Dekan




Dr. Dien Noviany R. S.E, MM, Akt.C.A
NIPY. 13662811975

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Dalam proses penyelesaian proposal, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany R. S.E, MM, Akt.C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Sumarno, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah kesibukan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
3. Dr. Dien Noviany R. S.E, MM, Akt.C.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran di tengah kesibukan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

4. Aminul Fajri, S.E, M.Si, Akt selaku Dosen Wali dan juga Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
7. Kedua Orangtuaku dan Adikku, terimakasih untuk kasih sayang yang tak pernah habis, juga semangat dan do'a untuk penulis.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan, bantuan dalam pembuatan proposal ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis, sehingga tidak menutup kemungkinan bila proposal ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki penyusunan proposal ini.

Tegal, Januari 2020

Penulis,

Saefi Nurfajriani

4315500149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda”~ Albert
Einstein

“Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi”~ Conan O’Brien

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta
- ❖ Adik tercinta
- ❖ Sahabatku Nur Latifah Dini
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik secara parsial maupun simultan. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan bulanan selama periode tahun 2015-2017. Sampel yang digunakan berjumlah tiga puluh enam dan penganalisaan data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Demikian juga dengan pengaruh secara parsial pada alpha 5% menunjukkan hasil yang sama. Selanjutnya berdasarkan Adjusted R Square dapat diketahui bahwa pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP dapat dijelaskan sebesar 36,8%

Kata kunci : penerimaan PPN, inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of inflation, economic growth, the exchange rate of the rupiah and the number of Taxable Entrepreneurs on the receipt of Value Added Tax (VAT) either partially or simultaneously. The sample in this study is a monthly report for the period 2015-2017. The sample used amounted to thirty-six and analyzing the data for hypothesis testing was performed by multiple regression.

The results showed that inflation, economic growth, the rupiah exchange rate, and the number of PFM had a significant effect on VAT receipts. Likewise, the partial effect on alpha 5% showed the same results. Furthermore, based on Adjusted R Square it can be seen that the influence of inflation, economic growth, the exchange rate of the rupiah, and the number of PKP can be explained by 36.8%

Keywords: VAT revenue, inflation, economic growth, rupiah exchange rate, the number of Taxable Entrepreneurs

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHANBIMBINGAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5

C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori	8
1. Tingkat Inflasi	8
2. Pertumbuhan ekonomi	13
3. Nilai Tukar Rupiah	15
4. Jumlah PKP	17
5. Penerimaan PPN	18
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Perumusan Hipotesis	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Teknik Pengambilan Sampel	33
D. Definisi Operasional Variabel	34
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data dan Uji Hipotesis	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
B. HASIL PENELITIAN.....	50
C. PEMBAHASAN.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	21
3.1 Operasional Variabel	36
4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	51
4.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	54
4.3 Hasil Uji Autokorelasi	56
4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	57
4.5 Hasil Uji t.....	58
4.6 Hasil Uji F	60
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	32
4.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal.....	48
4.2 Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik Histogram	53
4.3 Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik Normal Probability Plot.....	53
4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan berkesinambungan yang berlangsung terus-menerus yang berguna meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk mewujudkannya perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Waluyo, 2005). Salah satu usaha yang dilakukannya yaitu berkaitan dengan pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dan tidak mendapat jasa timbal yang ditunjukkan secara langsung dan berguna untuk membayar pengeluaran umum, Rochmat Soemitro, S.H dalam (Mardiasmo, 2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi besar bagi Negara. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi

2 golongan. Ada Pajak Langsung, merupakan pajak yang dibayar sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain, contohnya pajak penghasilan. Dan Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dilihat dari segi penerimaan, pajak penghasilan membantu negara untuk membiayai pengeluaran, tetapi tidak semua orang dikenakan PPh, pajak penghasilan hanya dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas PTKP, namun hal tersebut tidak berlaku bagi PPN, karena pajak tersebut dapat dibebankan kepada orang lain sehingga kemungkinan semua orang dapat dikenakan PPN. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang peredarannya dari produsen ke konsumen (Utomo dkk, 2011).

Pajak Pertambahan Nilai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi BKP atau JKP dikenakan PPN (Sutedi, 2011). Hampir seluruh barang yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia adalah hasil produksi yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan BKP atau JKP pada prinsipnya terutang PPN. Oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai dikenakan setiap orang didalam daerah pabean yang

mengonsumsi BKP atau JKP yang menjadi objek pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, meskipun belum mempunyai NPWP (Lubis, 2016).

Di Indonesia yang dimaksud dengan subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), PKP adalah pengusaha yang berkedudukan di Indonesia yang dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan dan kemungkinan menyerahkan BKP dan mendistribusikannya, mengimpor dan mengekspor Barang Kena Pajak, atau melakukan usaha Jasa Kena Pajak (Soemitro, 2011).

Besar kecilnya penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh laju inflasi (Wantara, 1997). Inflasi adalah hal yang pasti dialami oleh setiap negara sehingga setiap negara selalu berusaha agar tingkat inflasi terkendali dan stabil. Inflasi adalah proses suatu kejadian dan tinggi rendahnya tingkat harga. Sehingga jika tingkat harga tinggi maka inflasi juga tinggi. Inflasi terjadi apabila proses kenaikan harga yang berlangsung terus menerus dan saling mempengaruhi (Sukwiaty dkk, 2009).

Fenomena perpajakan yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* (Prastowo, 2018) mengemukakan bahwa rendahnya penerimaan PPN karena adanya pergeseran kebiasaan belanja masyarakat menjadi secara *online*. Pelaku usaha *online* belum menarik PPN atas barang yang dijualnya, barang yang diimpor juga lolos PPN. Jadi ada pengaruh kepada struktur perekonomian dan penerimaan PPN. Selain imbas belanja *online*, perubahan model ekonomi dari industri manufaktur ke perdagangan dan jasa. Rendahnya

penerimaan PPN juga diperkirakan karena adanya peningkatan PPN impor dan percepatan restitusi pajaknya.

Pertumbuhan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka pendapatan pemerintah melalui pajak akan semakin baik pula, karena pembangunan yang terjadi bersumber dari rakyat. Indikator untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto merupakan nilai barang dan jasa suatu negara yang akan diproduksi dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2011).

Selain fenomena tersebut juga permasalahan yang terjadi dipemerintah pada sektor ekonomi, rendahnya konsumsi dan penurunan daya beli masyarakat. Direktur *Institute for Development of Economic and Finance* (Indef), Enny Sri Hartati (2017) mengungkapkan bahwa penyebab daya beli menurun karena masih tingginya angka pengangguran dan stabilitas harga kebutuhan barang pokok. Turunnya daya beli akan berpengaruh kepada kondisi produsen dalam hal ini adalah para Pengusaha Kena Pajak. Kondisi ini secara langsung dapat berakibat pada penerimaan pajak. Selain menurunnya daya beli, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika juga menjadi masalah yang harus dibenahi oleh pemerintah. Agar dapat memperbaiki kondisi perekonomian, tentunya pemerintah membutuhkan cukup banyak dana sehingga harus berupaya menggali semua potensi penerimaan yang ada secara maksimal.

Variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP mempunyai keterkaitan erat atas hal tersebut, keempat variabel tersebut merupakan data yang bersifat fluktuatif. Penelitian ini dianggap penting karena diketahui begitu berperannya PPN sebagai sumber penerimaan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana keempat variabel diatas mempengaruhi penerimaan PPN.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang keterpengaruhannya variabel tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN, maka dilakukan kegiatan penelitian dengan judul “PENGARUH TINGKAT INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, NILAI TUKAR RUPIAH, DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA TEGAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

3. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
4. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah Pengusaha Kena Pajak serta pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bagi KPP Pratama Tegal, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk hal-hal yang menyangkut tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat sebagai bahan referensi antara teori yang didapat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan sumbangan pemikiran untuk pihak lain atau pembaca yang memerlukan untuk dikembangkan lebih luas dan mendalam.
2. Dari segi kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Inflasi

1.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan harga untuk naik secara umum dan berlangsung terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan harga tersebut meluas ke sebagian besar dari harga barang-barang lain, Boediono (1982: 155).

Inflasi adalah suatu keadaan dari nilai uang turun dan harga naik terus menerus, Cowt Hrey dalam (Pasaribu, 2011). Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan atas harga pada tahun tertentu dibanding dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2004).

1.2 Faktor Penyebab Inflasi

Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi antara lain :

a. Inflasi karena permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Adanya permintaan yang kuat terhadap jenis barang dari masyarakat, inflasi ini terjadi karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa

yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Biasanya kondisi ini terjadi pada masyarakat yang perekonomiannya tumbuh cepat.

b. Bertambahnya uang yang beredar (*Quantity Theory Inflation*)

Terdapat keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang yang ada tetap namun uang yang beredar lebih besar dua kali lipat, maka harga juga akan melonjak.

c. Inflasi karena kenaikan biaya produksi (*Cost Push Inflation*)

Kenaikan ini disebabkan oleh adanya desakan biaya faktor produksi yang terus mengalami kenaikan, kenaikan ini akan memaksa produsen untuk menaikkan harga produksi, sehingga akan berakibat pada harga produk yang akan naik saat diperjual belikan.

d. Inflasi karena struktur ekonomi yang kaku (*Structural Inflation Theory*)

Penyebabnya adalah struktur ekonomi yang kaku, maksudnya adalah pengusaha tidak dapat mencegah kenaikan permintaan akibat pertambahan jumlah penduduk, kondisi ini menyebabkan harga barang yang dibutuhkan naik dan stok yang ada dipasaran tidak tercukupi.

- e. Adanya fluktuasi dari luar negeri

Hal ini berkaitan erat dengan jumlah ekspor dan impor, investasi asing didalam negeri, serta jumlah penerimaan negara yang terus menurun, sehingga devisa negara juga akan terkuras.

1.3 Dampak Inflasi

Secara umum dampak dari inflasi yang tinggi dan tidak stabil adalah :

- a. Penurunan daya beli (*Purchasing Power*)

Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli karena nilai uang yang semakin rendah, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli akan berkurang jumlahnya.

- b. Kondisi ketidakpastian

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Masyarakat cenderung menyimpan dana berbentuk aset fisik dibandingkan tabungan di bank, oleh karena itu inflasi mengurangi intensif untuk menabung.

- c. Berkurangnya daya saing produk nasional

Inflasi yang tinggi membuat biaya produksi juga tinggi sehingga barang produksi nasional menjadi tidak kompetitif, baik untuk dikonsumsi dalam negeri maupun di ekspor.

1.4 Macam-macam Inflasi

Macam-macam inflasi dapat digolongkan menjadi (Sukirno, 2005):

1. Inflasi merayap yaitu inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun.
2. Inflasi sederhana yaitu inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun.
3. Hiperinflasi yaitu inflasi yang sangat tinggi dan menyebabkan tingkat harga naik dalam kurun waktu satu tahun.

1.5 Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Kebijakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi inflasi :

- a. Kebijakan fiskal, dengan menambah penerimaan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- b. Kebijakan moneter, dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- c. Dari segi penawaran, dengan melakukan langkah yang diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga.

1.6 Menghitung Laju Inflasi

Untuk menghitung tingkat inflasi dari waktu ke waktu, digunakan suatu angka indeks yang disusun dengan memperhitungkan jumlah barang dan jasa yang digunakan. Angka indeks untuk menghitung besarnya inflasi yaitu :

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Yaitu mengukur perubahan harga untuk transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang dan pembeli atau pedagang dengan jumlah yang besar. Dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHPB} - \text{IHPB tahun lalu}}{\text{IHPB tahun lalu}} \times 100\%$$

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks ini adalah yang paling banyak digunakan dalam perhitungan inflasi. Indeks ini disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK tahun lalu})}{\text{IHK tahun lalu}} \times 100\%$$

3. PDB Deflator

Yaitu mengukur perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan, dihitung dengan membandingkan PDB nominal pada tahun tertentu dengan PDB tahun tertentu yang ditetapkan. Dapat dihitung dengan rumus :

$\text{PDB Deflator} = (\text{PDB nominal} : \text{PDB riil}) \times 100\%$

2. Pertumbuhan Ekonomi

2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kegiatan yang berkembang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dimasyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk melihat keberhasilan suatu pembangunan dan merupakan syarat untuk penurunan pengangguran. Adapun syaratnya yaitu pertumbuhan ekonomi efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi hendaklah menyebar disetiap golongan termasuk di golongan penduduk yang miskin. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi itu perlu dipastikan terjadi disektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya, sehingga diperlukan pemerintahan yang cukup efektif dalam mendistribusikan manfaat pertumbuhan tersebut (Boediono, 2001).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat kenaikan Produk Domestik bruto atau Produk Nasional Bruto tanpa melihat kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk ataupun perubahan struktur ekonomi (Arsyad, 2004).

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum yaitu :

1. Faktor produksi, diharapkan mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan menggunakan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
2. Faktor investasi, dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit.
3. Faktor perdagangan luar negeri, harus terjadi surplus sehingga diharapkan mampu meningkatkan cadangan devisa dan mampu menstabilkan nilai rupiah.
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga yang harus diantisipasi agar dapat diterima oleh pasar.
5. Faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

2.3 Menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu berdasarkan harga konstan. Perhitungan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat karena untuk mengumpulkan PDB membutuhkan waktu sehingga perhitungan dilakukan dalam kurun waktu triwulan atau tahunan. Perhitungan secara tahunan diformulasikan dengan rumus :

$$\text{LPEt} = [\text{PDBt} - \text{PDBt-1}] / \text{PDBt-1} \times 100\%$$

Keterangan :

LPEt = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun t

PDBt = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan)

PDBt-1 = Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya

3. Nilai Tukar Rupiah

3.1 Pengertian Nilai Tukar

Definisi nilai tukar atau kurs yaitu harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah adalah nilai tukar satu rupiah yang diperlukan untuk bisa ditukarkan dengan satu US Dollar, ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap kurs (Kuncoro, 2001).

Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain, nilai tukar rupiah adalah nilai dari satu mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, yen, dan lainnya (Adiningsih dkk, 1998).

Nilai tukar dapat dihitung dengan rumus :

Jika kurs beli : Nilai Mata Uang Asing x Nilai Rupiah

$$\text{Jika kurs jual : } \frac{\text{Nilai Rupiah}}{\text{Nilai Mata Uang Asing}}$$

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah (Madura, 1993) yaitu :

1. Faktor fundamental

Faktor fundamental, berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, ekspektasi pasar, dan intervensi Bank Sentral.

2. Faktor teknis

Faktor teknis, berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada waktu tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap maka harga akan naik begitupun sebaliknya.

3. Sentimen pasar

Sentiment pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor berita-berita tertentu yang dapat mendorong harga naik atau turun dalam jangka pendek.

3.3 Jenis Sistem Nilai Tukar

Jenis sistem nilai tukar yang digunakan oleh suatu negara adalah (Nellis, 2000) :

1. Nilai tukar mengambang

Didefinisikan sebagai hasil keseimbangan yang berubah terus menerus sesuai dengan permintaan dan penawaran dipasar valuta asing.

2. Nilai tukar tetap

Di harapkan pemerintah dapat mempertahankan suatu kebijakan agar nilai mata uangnya tetap dan stabil.

3. Nilai tukar terkendali

Kondisi ini berlaku pada saat nilai tukar ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran, tetapi Bank Central turut ikut serta untuk menstabilkan nilainya.

4. Pengusaha Kena Pajak

4.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan dan memanfaatkan usaha jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 (UU No.42 tahun 2009).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Mohammad Yamin, 2012).

4.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban antara lain untuk:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

4.3 Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

- a. Pengusaha kecil.
- b. Pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

5.1 Pengertian

Penerimaan pajak adalah penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak tidak langsung yang disetor

oleh pihak lain (pedagang) dan bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut (UU no.17, 2010).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi BKP atau JKP (Waluyo, 2009).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pelayanan jasa kepada para konsumen (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

5.2 Subjek PPN

Subjek PPN dibagi dua yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PPN terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal :

- a. PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. PKP melakukan ekspor BKP dan JKP.

2. Non PKP

PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan merupakan objek PPN yang bukan PKP dalam hal :

- a. Impor BKP.
- b. Pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam lingkup daerah pabean.
- c. Pemanfaatan JKP di luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- d. Kegiatan membangun sendiri (pasal 16C UU PPN)

5.3 Objek PPN

Menurut (Mardiasmo, 2016: 341-342) PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didaerah pabean dilakukan oleh pengusaha.

Dengan syarat :

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean berdasarkan kegiatan usaha atau pekerjaanya.
2. Impor BKP.
 3. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean berdasarkan kegiatan usaha atau pekerjaanya.

- b. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
 5. Ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud oleh PKP.
 6. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan dan hasilnya untuk sendiri atau pihak lain.
 7. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan data tentang penelitian terdahulu sebagai pendukung dari penelitian ini. Berkaitan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Teknik Analisis	Hasil	Perbedaan
1.	Nadya Praciastuti (2018)	Pengaruh Inflasi, jumlah PKP, Pertumbuhan ekonomi terhadap	Regresi Data Panel	Secara cross section : <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tidak signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada satu variabel independen yang tidak ada yaitu nilai

		Penerimaan PPN di kanwil DJP Jateng II		<p>terhadap penerimaan PPN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN • Jumlah PKP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. <p>Secara time series :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN • Inflasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN • Jumlah PKP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. 	<p>tukar rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di kanwil DJP Jateng II.
2.	Almira herna renata, Kadarisman hidayat, Bayu Kaniskha (2016)	Pengaruh Inflasi, Nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jatim II	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan • Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara negatif dan signifikan • Jumlah PKP berpengaruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada satu variabel independen yang tidak ada yaitu pertumbuhan ekonomi • Lokasi penelitian di kanwil DJP Jatim I.

				<p>terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN. 	
3.	Farida khairani lubis (2016)	Pengaruh Jumlah PKP, Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama medan kota	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN • Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada satu variabel independen yang berbeda yaitu surat pemberitahuan masa • Lokasi penelitian di KPP Pratama Medan.
4.	Nazar nasrulloh (2015)	Jumlah PKP, Pertumbuhan ekonomi	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada satu variabel independen yang tidak ada yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah. • Lokasi penelitian di KPP Pratama Bandung.
5.	Arif nurrokhman (2014)	Analisis pengaruh Jumlah PKP, Surat Pemberitahuan Masa terhadap	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN • Jumlah Surat Pemberitahuan Masa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada satu variabel independen yang tidak sama yaitu surat pemberita

		penerimaan PPN studi pada KPP Pratama Semarang		berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.	huan masa • Lokasi penelitian di KPP Pratama Semarang.
--	--	--	--	--	---

Sumber : Review hasil penelitian terdahulu.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting (Sugiyono, 2010).

1. Tingkat Inflasi Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN

Pajak Pertambahan Nilai bersinggungan langsung terhadap perilaku masyarakat melalui konsumsi barang atau jasa yang mempunyai keterkaitan erat dengan inflasi. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena jika tingkat inflasi naik maka akan meningkatkan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Besar kecilnya penerimaan disektor pajak dipengaruhi oleh laju inflasi (Wantara, 1997).

Dengan adanya inflasi tidak semata-mata berpengaruh pada kenaikan harga tetapi akan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang. Pernyataan diatas didukung

oleh penelitian (Praciastuti, 2018) bahwa terdapat pengaruh positif antara inflasi dengan penerimaan PPN.

Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum yang berlangsung terus menerus. Jika terjadi kenaikan harga yang bersifat sementara, maka tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan kenaikan harga umum tersebut berarti bahwa semua unit ekonomi (konsumen maupun produsen) akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit dengan pengeluaran rupiah yang sama. Dengan kata lain mereka mengurangi konsumsi riil dengan adanya inflasi (Irawan, 1992).

Inflasi merupakan harga komoditi yang naik yang disebabkan tidak seimbang program sistem pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat disuatu negara tertentu. Tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan diikuti dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar dari tingkat inflasi maka inflasi tidak akan menjadi masalah ekonomi. Apabila biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi, maka menyebabkan harga jual relatif tinggi. Sementara disisi lain jika tingkat pendapatan masyarakat relatif tidak ada perubahan, maka inflasi akan menjadi masalah ekonomi jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama dengan porsi berbanding terbalik antara tingkat inflasi dengan tingkat pendapatan (Putong, 2013).

Prospek pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang akan semakin memburuk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi

cenderung menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Kecenderungan ini dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 1994). Dengan adanya inflasi juga berpengaruh dan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian suatu Negara, maka setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga perekonomian masyarakat ikut berkembang. Semakin tinggi angka inflasi akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun sehingga penerimaan pajak juga akan menurun. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Almira dkk, 2016) bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN.

2. Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN

Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat akan memberikan kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi BKP dan JKP di masyarakat (Alex dkk, 2012). Semakin tinggi elastisitas pajak maka semakin tinggi pula pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari setiap tambahan pertumbuhan ekonomi (Edi, 2013).

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum tentu menghasilkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena dengan terjadinya

pertumbuhan ekonomi akan berimbang pada penambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan tidak melebihi tingkat penambahan penduduk, maka pendapatan perkapita masyarakat juga akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan penambahan penduduk, maka perekonomian tidak mengalami perkembangan dan kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan. Jadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi harus melebihi tingkat penambahan penduduk (Sukirno, 2007).

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat membantu perkembangan rasio pajak. Secara teori, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara bertambah karena dorongan dari pembangunan ekonomi itu maka akan mempengaruhi perkembangan rasio pajak.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu. PDRB atas dasar harga di gunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan di gunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Semakin tinggi angka PDRB suatu daerah maka semakin tinggi pendapatan masyarakat dan semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah termasuk pajak. Apabila PDRB suatu daerah meningkat berarti kemampuan dalam membayar pajak juga ikut meningkat. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak tersebut juga semakin besar. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian (Nasrullah, 2015) bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan PPN.

3. Nilai Tukar Rupiah Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN

Nilai tukar merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh satu unit mata uang asing (Murni, 2006). Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut dapat berdampak pada penerimaan pajak atas konsumsi (Edalemen, 2000).

Salah satu potensi penerimaan pajak bergantung pada tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang nilainya ditentukan oleh kondisi perekonomian makro dimana salah satu indikator yang dapat dilihat adalah dari nilai kurs rupiah per US Dolar. Peningkatan atau penurunan penghasilan wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Kurs merupakan salah satu hal yang penting dalam perekonomian karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kurs dijadikan alat untuk mengukur bagaimana kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik dan stabil. Tidak stabilnya nilai tukar ini mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak mengimpor bahan baku industri akan mengalami dampak dari ketidakstabilan kurs ini, salah satunya yaitu melonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga barang yang diproduksi naik.

Pelemahan nilai rupiah yang terjadi akan mempengaruhi penerimaan pajak, dilihat dari ekspor yang tinggi sehingga konversi ke rupiahnya pun tinggi maka akan menambah penerimaan PPN, sebaliknya jika impor tinggi maka restitusinya tinggi dan akan mengurangi penerimaan PPN. Pernyataan di atas tidak didukung oleh penelitian (Almira dkk, 2016) bahwa tidak ada pengaruh positif antara nilai tukar rupiah dengan penerimaan PPN.

4. Jumlah PKP Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN

PPN timbul dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau perorangan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Setiap wajib pajak yang sudah memiliki kriteria sesuai dengan peraturan perpajakan

wajib dikukuhkan sebagai PKP. Bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan menambah potensipenerimaan perpajakandan juga akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas dilakukan oleh (Nursanti dan Padmono, 2013) yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang (UU No.42 Tahun 2009).Banyaknya PKP yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak maka potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ikut bertambah (Resmi, 2011). Semakin banyaknya PKP yang patuh dengan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan maka penerimaan PPN juga akan semakin meningkat (Haula, 2011).Uraian diatas sejalan dengan penelitian (Handayani, 2011) menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

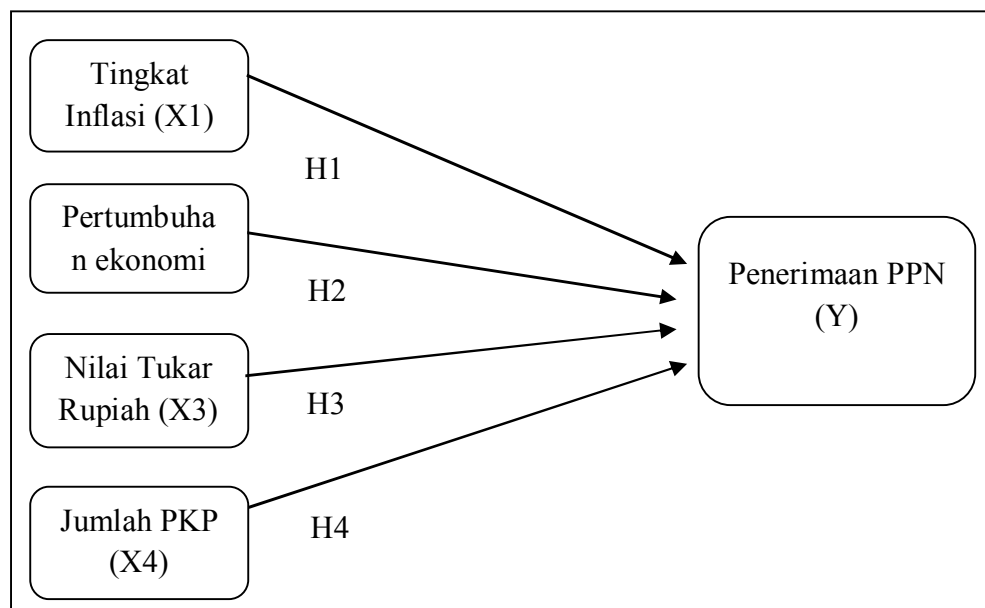
Menurut (Sukardji, 2005) semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka penyerahan JKP dan BKP juga akan semakin banyak dan bisa menjadi salah satu peluang bertambahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Haula, 2011) menyatakan bahwa ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap ketentuan mengenai saat terutangnya pajak maka dapat merugikan penerimaan negara dalam hal pajak.Menurut (Hanum, 2012) mengatakan

bahwa pihak ketiga yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian (Nurrokhman, 2014) bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini didasarkan atas penelitian-penelitian terdahulu dengan penambahan beberapa variabel dan metode penelitian yang berbeda. Setelah peneliti mengumpulkan beberapa jurnal, skripsi, dan tesis, peneliti mengambil beberapa variabel dari penelitian terdahulu.

Setelah menentukan judul dan metode analisis, peneliti mengumpulkan data-data dari variabel-variabel yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Tegal. Variabel yang diteliti adalah tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP yaitu sebagai variabel X dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai variabel Y. Peneliti mengambil data masing-masing variabel (tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah) dari situs Badan Pusat Statistik, sedangkan untuk variabel jumlah PKP diambil dari data KPP Pratama Tegal. Setelah memperoleh data-data dari setiap variabel peneliti mulai melakukan analisis.

Berikut adalah gambaran mengenai kerangka berpikir yang dibentuk secara sederhana untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

5. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 :Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H2 :Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H3 : Nilai tukar rupiah memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H4 : Jumlah PKP memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitumengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data agar dapat memberikan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan (Maria dkk, 2018).

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif karena peneliti akan menghitung seberapa besar pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di KPP Pratama Tegal, serta mengambil data dari situs resmi Badan Pusat Statistik dan BI.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu sehingga ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011).Populasi dalam penelitian ini adalah data bulanan mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP dan jumlah penerimaan PPN dalam kurun waktu 3 tahun berjumlah 36 pasang data (12 Laporan Bulanan x 3 tahun).

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik didalam populasi (Sugiyono, 2010).Sampel yang digunakan yaitu dengan teknik

penentuan sampel jenuh yaitu menggunakan semua anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel, maka jumlah sampelnya adalah 36 pasang data.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 2005).

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen

a. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana nilai uang turun dan harga naik secara terus menerus, Cowt Hrey dalam (Pasaribu, 2011). Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2004).

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perekonomian yang berkembang yang menyebabkan barang dan jasa bertambah, kenaikan output perkapita, dan kenaikan Produk Domestik Bruto untuk kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang, yang terjadi disetiap

periode yang akan menambah kemampuan masyarakat (Sadono Sukirno, 2012).

c. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah merupakan harga rupiah terhadap mata uang negara lain, nilai tukar rupiah adalah nilai dari satu mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, yen, dan lainnya (Adiningsih dkk, 1998).

d. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan atau memanfaatkan memanfaatkan usaha jasa diluar daerah pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 (UU No.42 tahun 2009).

2. Variabel Dependen

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi BKP atau JKP (Waluyo, 2009). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat

dipakainya faktor-faktor produksi di setiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran	Skala
Tingkat Inflasi (X1)	Perubahan harga-harga secara umum dalam satu tahun yang dihitung dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) (Sukirno, 2006)	Angka tingkat inflasi wilayah Tegal Jawa Tengah tahun 2015-2017	$\text{Inflasi} = (\text{IHK tahun ini} - \text{IHK tahun lalu}) \div \text{IHK tahun lalu} \times 100\%$	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi(X2)	Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2006)	PDRB wilayah Tegal Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2015-2017	$\text{LPEt} = (\text{PDBt} - \text{PDBt-1}) \div \text{PDBt-1} \times 100\%$	Rasio
Nilai Tukar Rupiah (X3)	Nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, yen, dan lain sebagainya (Adiningsih dkk, 1998).	Pergerakan nilai tukar tahun 2015-2017	Kurs beli = Nilai mata uang asing \times Nilai Rupiah Kurs Jual = Nilai Rupiah \div Nilai Mata Uang Asing	Nominal
Jumlah PKP(X4)	Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang	Jumlah PKP di wilayah Tegal Jawa Tengah	Jumlah PKP.	Nominal

	Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Mohammad Yamin, 2012).	tahun 2015-2017		
Penerimaan PPN (Y)	Pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi BKP atau JKP (Waluyo, 2009).	Jumlah penerimaan PPN di Tegal Jawa Tengah tahun 2015-2017	$PPN = (PPN \text{ bulan ini} - PPN \text{ bulan lalu}) \div PPN \text{ bulan lalu} \times 100\%$	Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data atau catatan yang diperlukan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh sudah dalam bentuk jadi dan telah diolah, biasanya dalam bentuk publikasi. Data mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak dan penerimaan PPN di peroleh dari KPP Pratama Tegal. Data mengenai Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi di dapat dari Berita Resmi Statistik (BRS) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dan data mengenai Nilai Tukar didapat dari situs BI.

F. Analisis Data dan Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen

dengan variabel independen, dan untuk mengetahui besaran dan arah tanda variabel bebas (Ghozali, 2009).

1. Uji Asumsi Klasik

1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2009).

Deteksi normalitas dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melihat grafik histogram dan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik *Normal Probability Plot*. Dasar pengambilan keputusannya untuk grafik histogram yaitu jika grafik menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, sedangkan untuk grafik *Normal Probability Plot* adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi mengikuti asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

1.2 Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2005) uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap variabel bebas saling berhubungan secara linier. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai $VIF \leq 10$ dan $TOL \geq 0,1$ maka tidak ada kecenderungan terjadi gejala multikolinier. Pengujian ini menggunakan SPSS dengan analisis *Collinearity Statistics*.

1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi gangguan yang diakibatkan faktor-faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama. Jika varians berbeda disebut homokedastisitas.

Pengujian ini dilakukan dengan melihat *Scatterplot* yang dihasilkan program SPSS. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, atau menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika pola tidak jelas, dan titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

1.4 Uji Autokorelasi

Deteksi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi pengujian ini adalah dengan *Uji Durbin-Watson (DW test)*.

Dimana jika angka D-W dibawah -2 maka ada Autokorelasi positif, jika angka D-W diantara -2 sampai +2 maka tidak ada Autokorelasi, dan jika angka D-W diatas +2 berarti ada Autokorelasi negatif.

2. Pengujian Hipotesis

2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda yang akan menguji pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dengan menggunakan alat bantu SPSS. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y = Variabel Dependen (Penerimaan PPN)

α = Konstanta

β = Koefisien

X1 = Variabel Independen (Inflasi)

X2 = Variabel Independen (Pertumbuhan Ekonomi)

X3 = Variabel Independen (Nilai Tukar Rupiah)

X4 = Variabel Independen (Jumlah PKP)

2.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen secara individual. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel digunakan tingkat signifikansi $5\% = 0,05$. Jika nilai probability t lebih besar dari $0,05$ maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari $0,05$ maka terdapat pengaruh pada variabel dependen.

2.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau $0,05$ maka kriteria pengujiannya :

- Jika nilai f hitung $< f$ tabel dengan tingkat signifikansi lebih dari $0,05$ maka H_0 ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
- Jika nilai f hitung $> f$ tabel dengan tingkat signifikansi kurang dari $0,05$ maka H_0 diterima, maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

2.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga sangat terbatas. Jika nilai mendekati satu, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Analisis ini menggunakan Uji R^2 dengan *Model Summary*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Pada tahun 1964 tepatnya pada bulan Juni didirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DJP Drs. Soejono Brotodiharjo. Dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal yang pada saat itu belum terbentuk.

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk menggali potensi pajak terus dilakukan seiring dengan perkembangan perekonomian di kedua daerah. Kabupaten Tegal waktu dulu hingga sekarang, tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi disekitar daerah Gunung Slamet. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang memiliki area bawang merah dan cabai merah yang luas mampu memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah yang besar. Bahkan sudah menjadi stok nasional. Oleh karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakatnya, maka Dirjen Pajak mempertimbangkan agar menjadikan

Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh DJP Drs. Sutadi Sukarya.

Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak dengan didasari bahwa tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan semata tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat luas terutama Wajib Pajak.

KPP Tegal sejak masih berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik negara di Jalan Dr. Soetomo, dan saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No.5 Kotamadya Tegal.

2. Kedudukan dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan wilayah kerja meliputi :

- a. Kota Tegal
- b. Kabupaten Tegal
- c. Kabupaten Brebes

3. Visi, Misi dan Nilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki visi sebagaimana visi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun yang menjadi visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah :

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah :

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Maksud yang terkandung dari Visi Direktorat Jenderal Pajak tersebut adalah meliputi :

- a. Misi Fiskal, yaitu menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi berdasarkan UU Perpajakan.

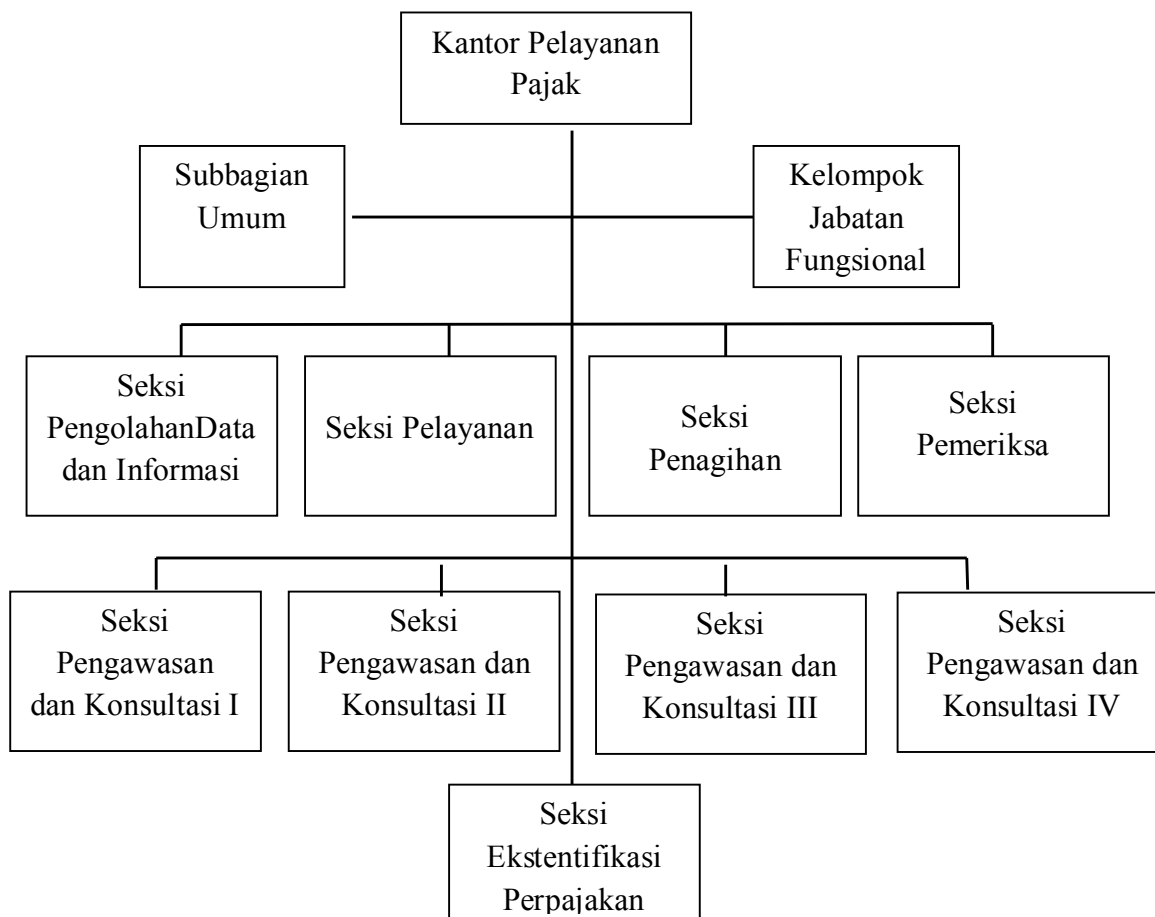
- b. Misi Ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa.
- c. Misi Politik, yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa.
- d. Misi Kelembagaan, yaitu senantiasa memperbarui diri, sejalan dengan aspirasi masyarakat dan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4. Struktur dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Tegal

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dilengkapi dengan struktur organisasi yang mencakup keseluruhan tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor.
- b. Subbagian Umum.
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Seksi Pelayanan.
- e. Seksi Ekstensifikasi.
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
- i. Seksi Penagihan.
- j. Seksi Pemeriksaan.
- k. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dapat dilihat seperti gambar berikut :



Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Adapun rincian tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2001 tanggal 24 Mei 2004, pada pasal 38 disebutkan sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan tata usaha.

- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi Pembuatan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dan e-Filing, pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG), serta penyiapan laporan kinerja.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
- d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan-penyimpanan dokumen penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

- f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.
- h. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, maksimum masing-masing variabel. Variabel yang digunakan meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP, dan penerimaan PPN. Dari data empat variabel independen dan satu variabel dependen tersebut diujilah pengujian statistik deskriptif, dan diperoleh hasil sesuai tabel berikut :

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INFLASI	36	2.79	7.26	4.5742	1.49950
PERTUMBUHAN EKONOMI	36	4.67	5.19	4.9633	.16840
NILAI TUKAR RUPIAH	36	12579.10	14396.10	13359.5244	330.56974
JUMLAH PKP	36	847	964	896.31	39.325
PENERIMAAN PPN	36	7307489460	96180310324	24032546238.53	20124267387.785
Valid N (listwise)	36				

Sumber : *Output SPSS*, data sekunder diolah 2019

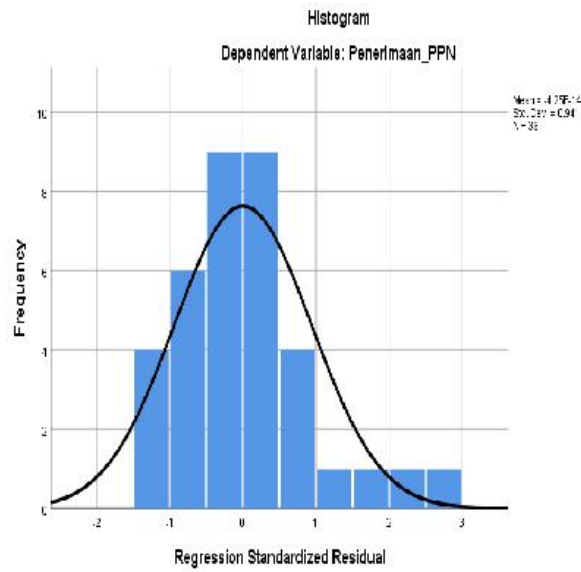
1. Output tabel 4.1 diatas menunjukkan nilai N (jumlah data) yang akan diteliti berjumlah 36 sampel.
2. Variabel inflasi berjumlah 36 sampel. Dengan nilai minimum sebesar 2,79 satuan. Nilai maksimum sebesar 7,26 satuan. Mean atau rata-ratanya sebesar 4,5742 satuan. Dan standar deviasi sebesar 1,49950 satuan.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi berjumlah 36 sampel. Dengan nilai minimum sebesar 4,67 satuan. Nilai maksimum sebesar 5,19 satuan. Mean atau rata-ratanya sebesar 4,9633 satuan. Dan standar deviasi sebesar 16840 satuan.
4. Variabel nilai tukar rupiah berjumlah 36 sampel. Dengan nilai minimum sebesar Rp.12.579,10. Nilai maksimum sebesar Rp.14.396,10. Mean atau rata-ratanya sebesar Rp.13.359,5244. Dan standar deviasi sebesar Rp.330,56974.

5. Variabel jumlah PKP berjumlah 36 sampel. Dengan nilai minimum sebesar 847 satuan. Nilai maksimum sebesar 964 satuan. Mean atau rata-ratanya sebesar 896,31 satuan. Dan standar deviasi sebesar 39,325 satuan.
6. Variabel penerimaan PPN berjumlah 36 sampel. Dengan nilai minimum sebesar Rp.7.307.489.460. Nilai maksimum sebesar Rp.96.180.310.324. Mean atau rata-ratanya sebesar Rp.24.032.546.238,53. Dan standar deviasi sebesar Rp.20.124.267.387,785.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

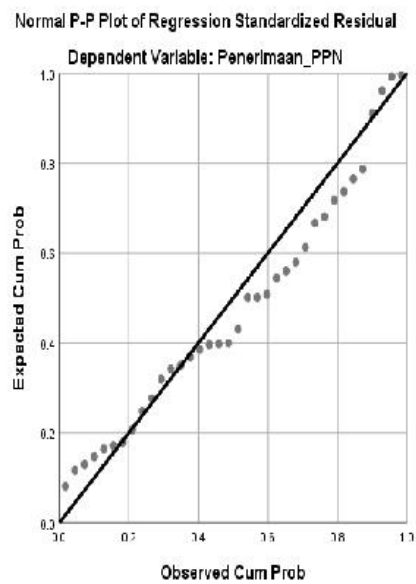
a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Deteksi normalitas dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melihat grafik histogram dan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik *Normal Probability Plot*.



Sumber : Data sekunder yang diolah

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik Histogram



Sumber : Data sekunder yang diolah

Gambar 4.3
Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan tampilan grafik histogram dan grafik *Normal Probability Plot* diketahui grafik histogram menampilkan pola distribusi yang normal, demikian pula pada grafik *Normal Probability Plot* menampilkan bahwa titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan juga bergerak mengikuti arah garis, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

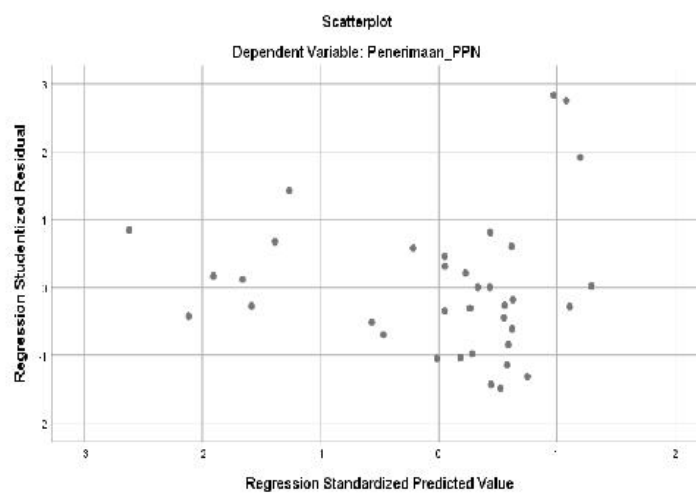
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-32.215	15.449		-2.085	.045		
	Inflasi	-.724	.520	-.383	-1.392	.174	.239	4.189
	Pert_ek	.261	5.018	.015	.052	.959	.204	4.905
	nilai_tukar	8.605	3.402	.366	2.529	.017	.861	1.162
	jml_PKP	2.470	2.616	.187	.944	.352	.462	2.166

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPN
Sumber : Data sekunder yang diolah

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap variabel bebas saling berhubungan secara linier. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada masing-masing variabel bebasnya. Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai

TOL kurang dari 0,1. Demikian juga dengan nilai VIF tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Sekunder yang diolah

Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi gangguan yang diakibatkan faktor-faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama.

Gambar 4.4 menunjukkan titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.664 ^a	.441	.368	.19954	1.609

a. Predictors: (Constant), jml_PKP, nilai_tukar, Inflasi, pert_ek

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Deteksi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Dimana jika angka D-W dibawah -2 maka ada Autokorelasi positif, jika angka D-W diantara -2 sampai $+2$ maka tidak ada Autokorelasi, dan jika angka D-W diatas $+2$ berarti ada Autokorelasi negatif.

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai D-W sebesar 1.609, diantara -2 sampai $+2$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda yang akan menguji pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai

tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dengan menggunakan alat bantu SPSS.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-32.215	15.449		-2.085	.045		
	Inflasi	-.724	.520	-.383	-1.392	.174	.239	4.189
	Pert_ek	.261	5.018	.015	.052	.959	.204	4.905
	nilai_tukar	8.605	3.402	.366	2.529	.017	.861	1.162
	jml_PKP	2.470	2.616	.187	.944	.352	.462	2.166

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -32,215 - 724 X_1 + 261 X_2 + 8,605 X_3 + 2,470 X_4 + e$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan :

1. Nilai koefisien konstanta sebesar -32,215 satuan menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP bersifat konstan, maka penerimaan PPN akan bernilai negatif atau mengalami penurunan sebesar 32,215 satuan.

2. Nilai koefisien regresi variabel inflasi negatif sebesar -724 satuan menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan inflasi maka penerimaan PPN akan mengalami penurunan sebesar 724 satuan, demikian juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomipositif sebesar 261 satuan menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menambah penerimaan PPN sebesar 261 satuan, demikian juga sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi variabel nilai tukar rupiah positif sebesar Rp. 8,605 menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan nilai tukar rupiah maka akan menambah penerimaan PPN sebesar Rp. 8,605, demikian juga sebaliknya.
5. Nilai koefisien regresi variabel jumlah PKP positif sebesar 2,470 satuan menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan jumlah PKP maka penerimaan PPN akan meningkat sebesar 2,470 satuan, demikian juga sebaliknya.

b. Hasil Uji t

Tabel 4.5
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-32.215	15.449		-2.085	.045
	Inflasi	-.724	.520	-.383	-1.392	.174
	Pert_ek	.261	5.018	.015	.052	.959
	nilai_tukar	8.605	3.402	.366	2.529	.017
	jml_PKP	2.470	2.616	.187	.944	.352

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPN
Sumber : Data sekunder diolah

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Hasil perhitungan koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien konstanta sebesar -32,215. Hasil pengujian hipotesis secara parsial antara variabel independen dan dependen dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN, variabel inflasi menunjukkan tingkat signifikansi $0,174 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN, variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat signifikansi $0,959 > 0,05$

yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

3. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN, variabel nilai tukar rupiah menunjukkan tingkat signifikansi $0,017 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
4. Pengaruh Jumlah PKP terhadap penerimaan PPN, variabel jumlah PKP menunjukkan tingkat signifikansi $0,352 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

c. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dapat berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6
Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.972	4	.243	6.106	.001 ^b
	Residual	1.234	31	.040		
	Total	2.207	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

b. Predictors: (Constant), jml_PKP, nilai_tukar, Inflasi, pert_ek

Sumber : Data diolah, 2019

Hasil uji F pada tabel 4.6 diatas, didapat F hitung sebesar 6,106 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

d. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 ^a	.441	.368	.19954

a. Predictors: (Constant), jml_PKP, nilai_tukar, Inflasi, pert_ek

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber : Data diolah, 2019

Hasil output SPSS pada tabel 4.7, pada R menunjukkan korelasi berganda antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat dan jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Pada tabel 4.7 nilai R sebesar 0,664 menunjukkan bahwa

hubungan antara variabel independen dengan dependen adalah erat. Uji koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen (inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP) dapat menjelaskan variabel dependen (penerimaan PPN). Tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,368 atau 36,8% menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya yaitu $(100\% - 36,8\% = 63,2\%)$ dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian pada variabel inflasi terhadap penerimaan PPN berdasarkan analisa dan uji yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh nilai t hitung sebesar -1,392 dengan signifikansi 0,174. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Inflasi adalah gejala yang menunjukkan tingkat harga naik secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika kenaikan harga bersifat sementara, maka tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan kenaikan harga umum tersebut yang berarti bahwa semua unit ekonomi baik konsumen maupun produsen akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit dengan pengeluaran rupiah yang sama. Dengan kata lain mereka mengurangi konsumsi riil dengan adanya inflasi (Irawan, 1992).

Inflasi merupakan naiknya harga komoditi yang disebabkan tidak seimbangannya program sistem pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat disuatu negara tertentu. Tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan diikuti dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar dari tingkat inflasi tersebut maka inflasi tidak akan menjadi masalah ekonomi. Apabila biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi, maka menyebabkan harga jual juga relatif tinggi. Jika tingkat pendapatan masyarakat relatif tidak ada perubahan, maka inflasi akan menjadi masalah ekonomi jika berlangsung dalam waktu yang relatif lama (Putong, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Rossar Maries (2008) bahwa inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang pada kurun waktu tertentu disuatu negara. Dampak yang ditimbulkan dari inflasi adalah berkurangnya pendapatan riil masyarakat diakibatkan karena turunnya nilai riil uang, turunnya nilai riil uang maka pendapatan riil juga ikut berkurang. Berkurangnya pendapatan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak menjadi turun karena pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Praciastuti, 2018) bahwa terdapat pengaruh positif antara inflasi dengan penerimaan PPN. Semakin tinggi angka inflasi maka akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun sehingga penerimaan pajak juga akan menurun. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Almira dkk, 2016) bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian pada variabel pertumbuhan ekonomiterhadap penerimaan PPN berdasarkan analisa dan uji yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomitidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh nilai t hitung sebesar 0,052 dengan signifikansi 0,959. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang suatu pembangunan ekonomi yang terjadi disuatu negara tertentu, sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat juga turut meningkat.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban atas berbagai macam pertanyaan dan masalah kesejahteraan, namun hal tersebut tetap menjadi unsur penting dalam program pembangunan untuk kemakmuran masyarakat.Berbagai penelitian yang telah dilakukan mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam usaha meningkatkan kemakmuran msyarakat.

Sadono Sukirno menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka akan meningkat pula produksi barang dan jasa sehingga meningkatkan pula standar hidup. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya akan memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Semakin tinggi angka PDRB suatu daerah maka semakin tinggi pendapatan masyarakat dan semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah termasuk pajak. Jika PDRB suatu daerah meningkat berarti kemampuan dalam membayar pajak juga meningkat. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak tersebut juga semakin besar. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian (Nasrullah, 2015) bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan PPN.

3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian pada variabel nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN berdasarkan analisa dan uji yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,529 dengan

signifikansi 0,017. Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Nilai tukar merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Murni, 2006). Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada penerimaan pajak atas konsumsi (Edalemen, 2000).

Potensi penerimaan pajak salah satunya sangat tergantung pada tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang besaran nilainya ditentukan oleh kondisi perekonomian makro dimana salah satu indikatornya dapat dilihat dari nilai kurs rupiah per US Dolar. Peningkatan atau penurunan penghasilan wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Kurs merupakan salah satu hal yang penting dalam perekonomian karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kurs dijadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik dan stabil. Tidak stabilnya nilai tukar ini akan mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak

mengimpor bahan baku industri akan mengalami dampak dari ketidakstabilan kurs ini, yaitu melonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga barang naik.

Pelemahan rupiah yang terjadi akan mempengaruhi penerimaan pajak, dilihat dari ekspor yang tinggi sehingga konversi ke rupiahnya juga tinggi maka akan menambah penerimaan PPN, sebaliknya jika impor tinggi maka restitusinya tinggi maka akan mengurangi penerimaan PPN. Pernyataan diatas tidak didukung oleh penelitian (Almira dkk, 2016) bahwa tidak ada pengaruh positif antara nilai tukar rupiah dengan penerimaan PPN.

4. Pengaruh Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian pada variabel jumlah PKP terhadap penerimaan PPN berdasarkan analisa dan uji yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh nilai t hitung sebesar 0,944 dengan signifikansi 0,352. Jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan apabila Pengusaha Kena Pajak mengalami penurunan maka angka penerimaan PPN juga mengalami penurunan begitu pula sebaliknya.

PPN timbul dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau perorangan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Setiap wajib pajak yang memiliki kriteria sesuai dengan peraturan perpajakan wajib

dikukuhkan sebagai PKP. Bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP maka akan menambah potensi perpajakan dan akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas dilakukan oleh (Nursanti dan Padmono, 2013) yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

Menurut (Sukardji, 2005) semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak dan bisa jadi peluang bertambahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Haula, 2011) menyatakan bahwa ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap ketentuan mengenai saat terutangnya pajak tersebut dapat merugikan penerimaan negara dalam hal pajak. Menurut (Hanum, 2012) mengatakan bahwa pihak ketiga yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurrokhman, 2014) bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Menurut (Sukardji, 2005) semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak dan bisa jadi peluang bertambahnya penerimaan PPN.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN yang terdaftar di KPP Pratama Tegal tahun 2015-2017. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 36 sampel adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji kelayakan model (Uji F) variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
2. Hasil uji T menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN, jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN
3. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,368 artinya 36,8% variabel penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP. Sedangkan sisanya yaitu 63,2% dijelaskan oleh sebab lain diluar model.

D. SARAN

Bertitik tolak dengan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dari hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka saran penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal diharapkan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi, dengan cara menambah hasil produksi dan tidak mengimpor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi.
2. Bagi KPP Pratama Tegal diharapkan memaksimalkan kegiatan untuk menambah jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan PPN.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian dan memperhatikan variabel ekonomi makro lainnya yang memiliki peran terhadap penerimaan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Nadya Praciastuti. 2018. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Jateng tahun 2011-2015 (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jateng II)*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Susan, David, dan Heince. “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)*”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.15 No.04 Tahun 2015.
- Mira Fadilah. 2017. Makalah Nilai Tukar. *Online*. <https://mirafadilah25.blogspot.com/2017/12/makalah-nilai-tukar>.(Diakses tanggal 25 Maret 2019).
- Nazar Nasrullah. 2015. “*Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Bandung Karees Periode 2012-2014)*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Komputer Indonesia.
- Astri Silfianingsih. Makalah Pertumbuhan Ekonomi. *Online*. <https://astrisilfianingsih.wordpress.com/ekonomi-industri/makalah-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>.(Diakses tanggal 25 Maret 2019).
- https://www.academia.edu/12683314/Makalah_Inflasi_Di_Indonesia. (Diakses tanggal 25 Maret 2019).
- Dedy Setya. 2014. “*Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*”. Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya.
- Almira, Kadarisman, dan Bayu. 2016. “*Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II)*”. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1 2016.
- Nadya Fazriana Haniz. 2013. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal*”. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Farida Khairani Lubis. 2016. “*Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan*

- Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*".Jurnal Wahana Inovasi Vol.5 No.2 2016.
- Mispiyanti, Kristanti. 2017. "*Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabuptaen Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Purworejo*". Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomidan Bisnis. (SNAPER-EBIS 2017). Hal.219.
- Olivia, Yudianto. 2016. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Wilayah Jabodetabek*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.16 2016.
- Damayanti, et al. 2016.*Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara-negara Asia (Studi Pada Word Bank Periode 2005-2014)*.Jurnal perpajakan (JEJAK).Vol 9.No.1.
- Pusphita, Vilia dan Supadmi, 2018.*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi pada Penerimaan PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak se Bali)*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556. Vol.22 No.2, 1530-1556
- Renata, et al. 2016.*Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol.9 No.I 2016.
- Saepudin, 2008.*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatra Utara*.Tesis Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo.2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://tegalkab.bps.go.id>
- <https://tegalkota.bps.go.id>
- <https://jateng.bps.go.id>
- <https://www.bi.go.i>

LAMPIRAN

DATA PENELITIAN

NO	Tahun	Bulan	VARIABEL				
			INFLASI (X1)	ECONOMIC GROWTH (X2)	NILAI TUKAR (X3)	JUMLAH PKP (X4)	PENERIMAAN PPN (Y)
1	2015	Januari	6.96	4.71	12579.10	847	10032422882
2		Februari	6.29	4.71	12749.84	848	7307489460
3		Maret	6.38	4.71	13066.82	849	9496755177
4		April	6.79	4.67	12947.76	850	10146021472
5		Mei	7.15	4.67	13140.53	852	10962435141
6		Juni	7.26	4.67	13313.24	853	15440091119
7		Juli	7.26	4.73	13374.79	854	22466519203
8		Agustus	7.18	4.73	13781.75	855	12755110366
9		September	6.83	4.73	14396.10	857	14317865720
10		Oktober	6.25	5.04	13795.86	858	22466168985
11		November	4.89	5.04	13672.57	859	22887374965
12		Desember	3.35	5.04	13854.60	861	89767204881
13	2016	Januari	4.14	4.92	13889.05	865	15156398998
14		Februari	4.42	4.92	13515.70	870	17192477032
15		Maret	4.45	4.92	13193.14	875	12034163721
16		April	3.6	5.18	13179.86	880	12800854909
17		Mei	3.33	5.18	13419.65	886	15156060629
18		Juni	3.45	5.18	13355.05	890	23247163938
19		Juli	3.21	5.02	13118.82	895	13463336299
20		Agustus	2.79	5.02	13165.00	899	20210474968
21		September	3.07	5.02	13118.24	904	22359988792

22		Oktober	3.31	5.02	13017.24	909	24443923771
23		November	3.58	5.02	13310.50	914	33490790952
24		Desember	3.02	5.02	13417.67	919	96180310324
25	2017	Januari	3.49	5.01	13358.71	922	19007138830
26		Februari	3.83	5.01	13340.84	926	12278876226
27		Maret	3.61	5.01	13345.50	930	16951934354
28		April	4.17	5.01	13306.39	934	14182880029
29		Mei	4.33	5.01	13323.35	938	19046046566
30		Juni	4.37	5.01	13298.25	941	23523921643
31		Juli	3.88	5.06	13342.10	945	21679605133
32		Agustus	3.82	5.06	13341.82	949	32430759303
33		September	3.72	5.06	13303.47	953	23096207594
34		Oktober	3.58	5.19	13526.00	956	26665593239
35		November	3.3	5.19	13527.36	960	32563012464
36		Desember	3.61	5.19	13556.21	964	69964285502